



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI V DPR RI**

**(BIDANG PERHUBUNGAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN RAKYAT,
PEMBANGUNAN PEDESAAN DAN KAWASAN TERTINGGAL, BADAN METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA, BADAN SAR NASIONAL, BPLS DAN BPWS)**

| | |
|---------------|---|
| Tahun Sidang | : 2014 – 2015 |
| Masa Sidang | : II |
| Rapat | : Ke - |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 21 Januari 2015 |
| Sifat | : Terbuka |
| Pukul | : 10.30 WIB s.d 15.00 WIB |
| Tempat | : Ruang Rapat Komisi V (Ruang KK V), Gedung Nusantara DPR RI |
| Acara | : Membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 |
| Ketua Rapat | : H. Muhidin M. Said, SE, MBA |
| Sekretaris | : Dra. Prima MB. Nuwa, MSi |
| Hadir Anggota | : dari 54 orang Anggota Komisi V DPR RI |
| Hadir Mitra | : Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat beserta jajaran |

KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

I. PENDAHULUAN

1. Rapat dibuka pada pukul 10.30 WIB setelah kuorum terpenuhi dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Ketua Rapat menyampaikan bahwa Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada hari ini untuk membahas Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat.
3. Ketua Rapat mempersilakan kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk menyampaikan paparan dan penjelasannya.
4. Ketua Rapat mempersilakan kepada Anggota Komisi V DPR RI untuk menyampaikan pertanyaan dan tanggapan.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT:

1. Komisi V DPR RI memberi apresiasi kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terhadap Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester I Tahun 2014 atas Laporan Keuangan Tahun 2013 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan juga opini Wajar Tanpa Pengecualian dengan Paragraf Penjelas untuk Kementerian Perumahan Rakyat pada periode Pemerintahan 2009-2014.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk memperbaiki sistem dan metoda pencatatan, pengelolaan, pengendalian, dan pelaporan Asset dan Barang Milik Negara yang dikelola Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang keuangan negara.
3. Komisi V DPR RI mendesak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk segera menyelesaikan tindak lanjut beberapa temuan yang belum diselesaikan dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari ini, agar tidak lagi menjadi temuan di masa mendatang, serta melaporkan hasilnya kepada Komisi V DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 15.00 WIB.

Jakarta, 21 Januari 2015

**MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

TTD

M. BASOEKI HADIMOELJONO

KETUA RAPAT,

TTD

H. MUHIDIN M. SAID